

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Majunya perekonomian sebuah negara adalah aspek yang sangat krusial untuk digapai sebab tiap negara mendambakan perubahan yang lebih baik di era modern ini. Pertumbuhan perekonomian pada konteks global saat ini mengharuskan pencapaian keuntungan yang optimal. Indonesia perlu berkompetisi dengan negara-negara lain, khususnya pada hal penggunaan system informasi akuntansi dengan efektif serta efisien. System informasi akuntansi memiliki peranan yang sangat signifikan pada perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Di pada instansi pemerintahan ataupun perusahaan, system informasi akuntansi yang sedang berjalan berperan guna menjadikan pelaporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta untuk menilai kinerja perusahaan ataupun instansi pemerintahan menurut pelaporan keuangan tersebut. System informasi akuntansi biasanya dipakai baik dengan eksternal ataupun internal, serta berperan sebagai dasar penilaian pajak bagi perusahaan ataupun instansi pemerintahan.

Semua instansi pemerintahan pada menjalankan program kerja diwajibkan guna membuat serta mencatat tahapan transaksi melalui kas, yang diperlukan guna membayar operasi program kerja tersebut. Kas adalah dana yang siap serta bebas dipakai kapan saja jika diperlukan, dan merupakan elemen penting pada transaksi di instansi pemerintahan. Pemerintahan memerlukan system informasi akuntansi kas yang mengatur pemasukan serta pengeluaran kas.

Pemasukan serta pengeluaran kas ialah bagian dari system akuntansi yang mencakup tahapan yang wajib diikuti oleh instansi pemerintahan pada mengelola pemasukan serta pengeluaran kas.

Pemerintahan daerah terdiri dari dua subsystem yang bertugas mengelola keuangan daerah, yaitu Satuan Kerja yang mengatur Keuangan Daerah (SKPKD) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kedua subsystem ini saling berkaitan, sebab sumber penyusunan pelaporan keuangan daerah (SKPKD) berasal dari pelaporan keuangan SKPD. Jika SKPD tidak menyusun pelaporan keuangan dengan benar, hal ini nantinya berdampak pada pelaporan keuangan yang disusun oleh SKPKD. System akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, serta pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian serta koreksi, serta penyusunan pelaporan keuangan SKPD.

Aturan pemerintahan yang berlaku menyatakan bahwasanya SKPD wajib melakukan tahapan akuntansi serta menyusun pelaporan keuangan yang nantinya diutarakan kepada Gubernur/Bupati melalui Pejabat yang mengatur Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, tiap SKPD diwajibkan guna menyusun pelaporan keuangan.

Aturan pemerintahan pada negeri Pemendagri No 77 Tahun 2020 menyangkut asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan tertib, ekonomi, serta bertugas serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat bagi masyarakat. pada aktivits ekonomi, pemasukan serta

pengeluaran kas ialah suatu hal yang sangat sensitif keberadaanya pada suatu organisasi pemerintahan.

Kota Kupang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan yang beroperasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan kota ataupun pusat. tiap instansi pemerintahan diwajibkan memiliki pelaporan keuangan serta non-keuangan yang wajib diserahkan serta dipertanggungjawabkan kepada instansi pemerintahan terkait. pelaporan tersebut juga wajib disertai bukti-bukti pendukung guna memastikan kebenarannya serta menghindari kecurigaan. guna menghindari serta meminimalkan masalah, pencatatan yang baik sangat diperlukan. Pencatatan yang baik memudahkan instansi pemerintahan pada mempertanggungjawabkan kebenaran isi laporan. Pencatatan yang dibuat meliputi aspek materil serta non-materil, seperti pencatatan mengenai kas.

Instansi pemerintahan sangat memerlukan kas, serta ketersediaan serta penggunaan kas tersebut wajib dicatat. Kas terlibat pada berbagai transaksi instansi pemerintahan, baik pada pemasukan ataupun pengeluaran. Kas dipakai guna membayar tugas serta biaya lainnya, serta meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, serta simpanan di bank serta lembaga keuangan lainnya. Pemasukan kas sangat penting guna membayar aktivitas operasional harian instansi, sementara pengeluaran kas dipakai guna berbagai biaya yang mendukung operasional instansi pemerintahan tersebut.

Dalam mengambil keputusan, suatu instansi pemerintahan membutuhkan informasi yang andal, salah satunya ialah pelaporan keuangan yang bisa diandalkan, relevan, serta terpercaya yang dihasilkan oleh system akuntansi

yang baik. System akuntansi yang lemah nantinya mengakibatkan pengendalian internal yang juga lemah, sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan kurang andal serta relevan guna pengambilan keputusan. System akuntansi ialah metode serta tahapan guna mengumpulkan, membagi, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan serta operasional organisasi. System akuntansi mencakup organisasi formulir, catatan, serta pelaporan keuangan yang diperlukan oleh instansi pemerintahan guna memudahkan pengolahan pelaporan keuangan.

System akuntansi ini yang menjadi bahan pokok penelitian ialah system akuntansi desentralisasi `yang menurut para ahli ialah tiap kantor menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada kantor ataupun instansi pemerintahan serta system akuntansi ialah Sebuah formulir, catatan, serta pelaporan yang dikoordinasikan sekian rupa sehingga bisa dipakai guna menyediakan informasi yang diperlukan.

Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah salah satu dinas yang menerapkan system akuntansi pemerintahan yang sudah menerapkan system PP No.45 tahun 2013 menyangkut bisa melakukan pendapatan serta belanja negara, serta pemasukan serta pengeluaran kas negara yang tertuang pada anggaran pendapatan serta belanja negara.

Gambaran dengan umum bisa dilihat pada beberapa program kerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT pada rentang tahun 2019-2021 yang tertuang pada Realiasi Pendapatan Anggaran Belanja sebagaimana pada tahun 2019 terdapat realiasi anggaran pendapatan belanja guna program aktivitas kerja Pelayanan

administrasi perkantoran, program pengelolaan unit pelaksana teknis serta program kerja terakhir ialah Pelaksanaan urusan ketatausahaan . Sementara di tahun 2020 terdapat realiasi anggaran program peningkatan kerja serta penilaian tiap bidang angkutan, serta program peningkatan serta pengembangan system pelaporan pencapaian kerja serta keuangan. di tahun 2021 ialah realiasi program penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan Udara, program pembinaan serta penilaian tugas pelaksanaan di bidang perhubungan Darat serta program pembinaan serta penilaian di bidang perhubungan Laut.

Berikut ialah Tabel Realisasi Pendapatan Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Provinsi NTT tahun 2019, 2020 serta 2021:

Tabel 1.1
Realisasi Pemasukan Pendapatan Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Provinsi NTT
Tahun 2019, 2020 serta 2021

NO	TAHUN	URAIAN	PENDAPATAN				ANGGARAN BELANJA			
			TARGET	REALISASI	%	SELISIH	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SELISIH
1	2019	1.Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 2.320.370.000	Rp. 28.280.000		Rp. 50.763.000	Rp. 12.503.494.381,666	Rp. 12.059.157.348,333		Rp. 444.337.033,333
		2. Pegelolahan unit pelaksanaan teknis.	Rp.2.230.370.000	Rp.28.280.000		Rp. 50.763.000	Rp. 12.503.494.381,666	Rp. 12.059.157.348,333		Rp. 444.337.033,333
		3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan	Rp. 2.230.370.000	Rp. 28.280.000		Rp. 50.763.000	Rp. 12.503.494.381,666	Rp. 12.059.157.348,333		Rp. 444.337.033,333
		JUMLAH	Rp. 696.111.000,00	Rp. 848.400.000,00	82,05%	Rp. 152.289.000,00	Rp. 27.307.152.685,00	Rp. 25.875.190.661,00	94,76%	Rp. 1.431.962.024,00
2	2020	1.Program peningkatan kerja serta penilaian di tiap bidang angkutan	Rp. 414.749.500	Rp. 672.100.000		Rp. 252.350.500	Rp. 12.667.077.434	Rp. 12.654.994.769,5		Rp. 12.082.664,5
		2. Program peningkatan serta pengembangan system pelaporan pencapaian kerja serta keuangan.	Rp. 414.749.500	Rp. . 672.100.000		Rp. . 252.350.500	Rp. 12.667.077.434	Rp. 12.654.994.769,5		Rp. 12.082.664,5
		JUMLAH	Rp. 829.499.000,00	Rp. 1.344.200.000,00	62,45 %	Rp. 504.701.000,00	Rp. 25.334.154.868,00	Rp. 25.309.989.539,00	95,27 %	Rp. 24.165.329,00
3	2021	1. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan Udara.	Rp.329.229.666,66	Rp. 358.200.000		Rp. 28.970.333,33	Rp. 12.503.494.381,666	Rp. 12.059.157.348,333		Rp. 444.337.033,333
		2. Pembinaan serta penilaian tugas pelaksanaan di bidang perhubungan Darat.	Rp.329.229.666,66	Rp. 358.200.000		Rp. 28.970.333,33	Rp. 12.503.494.381,666	Rp. 12.059.157.348,333		Rp. 444.337.033,333
		3. Pembinaan serta penilaian di bidang perhubungan Laut.	Rp.329.229.666,66	Rp. 358.200.000		Rp. 28.970.333,33	Rp. 12.503.494.381,666	Rp. 12.059.157.348,333		Rp. 444.337.033,333
		JUMLAH	Rp.987.689.000,00	Rp. 1.074.600.000,00	91,9%	Rp. 86.911.000,00	Rp. 37.510.483.145,00	Rp. 36.177.472.045,00	96,45 %	Rp. 1.333.011.100,00

Pada Tabel 1.1, data realisasi pemasukan pendapatan anggaran belanja pada Dinas Perhubungan dari tahun 2019 target realisasi pendapatan serta belanja anggaran 82,05% sedangkan di tahun 2020 realisasi anggaran belanja Dinas Perhubungan Povinsi NTT mengalami penurunan yakni hanya mencapai 62,45% serta tidak sesuai target yang diinginkan di tahun tersebut hal ini terjadi akibat perubahan pada APBD yang di pakai guna kepentingan yang tidak terduga, sesuai aturan pemerintahan pada negeri (Pemendagri) No. 21 Tahun 2011 menyangkut asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan tertutup, perekonomian serta bertugas serta memperhatikan keadilan serta bermanfaat bagi masyarakat, sehingga APBD tersebut di pakai guna kepentingan lain seperti yang pertama anggaran 2020, serapan anggaran lebih banyak pencegahan serta penanganan covid-19 pada tahun tersebut. Sedangkan di tahun 2021 realisasi anggaran belanjanya mengalami peningkatan, mencapai 91,1%, berarti hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan perekonomian di tahun 2019 serta 2021 sedangkan penurunan diawal tahun 2020 , dikarenakan pada tahun 2020 masa awal pandemi covid-19 di Kota Kupang serta pemerintahan membatasi mayarakat guna beraktivitas di luar rumah, sehingga tidak terealisasi ataupun tidak mencapai target sebab adanya belanja tak terduga. Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT. “**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana System Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi selama tahun 2019-2021.

1.3 Tujuan serta Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah guna memahami System Akuntansi Pemasukan dan Pengeluaran Kas pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi NTT selama tahun 2019-2021.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dilaksanakan penulis ialah :

- a) Bagi penulis, penelitian ini bertujuan guna memperluas serta mengembangkan wawasan berpikir serta menerapkan teori yang sudah dipahami di bangku perkuliahan terkait system akuntansi pemasukan serta pengeluaran kas.
- b) Bagi Dinas Perhubungan Provinsi NTT, penelitian ini bisa dipakai sebagai dasar guna pengambilan keputusan, penilaian di masa depan, serta merumuskan rencana kebijakan yang tepat.

- c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa berperan guna menyempurnakan penelitian pada topik yang sama agar hasilnya menjadi lebih baik.
- d) Bagi universitas, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan bagi akademisi pada bidang analisa pelaporan keuangan akuntansi.